

EKOSISTEM DIGITAL DAN NARASI KEBANGSAAN: RELEVANSI PANCASILA SEBAGAI PENUNTUN ETIKA PUBLIK VIRTUAL

Fadil Mas'ud¹*, Anif Istianah²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*E-mail: fadil.masud@staf.undana.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 6-4-2025

Revised: 15-6-2025

Accepted: 22-6-2025

Keywords

Pancasila; Narasi kebangsaan; Media sosial, Etika digital; Ekosistem digital

ABSTRACT

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, membentuk opini, dan menyuarakan identitas kebangsaan. Ruang digital tidak hanya menjadi saluran komunikasi, tetapi juga arena kontestasi narasi yang sarat dengan dinamika politik, budaya, dan ideologis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat direlevansikan sebagai kerangka etika publik dalam ekosistem digital yang semakin kompleks. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian literatur terkini, pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama: dinamika narasi kebangsaan di ruang virtual, representasi dan reduksi nilai Pancasila di media sosial, serta fungsi Pancasila sebagai landasan etika bermedia digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila masih sering diposisikan secara normatif dan seremonial, nilai-nilainya tetap relevan dalam merespons tantangan seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi identitas. Diperlukan reinterpretasi nilai secara kontekstual, penguatan literasi etika digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjadikan Pancasila hidup sebagai pedoman moral warga negara di ruang publik virtual. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga fondasi etika bermedia dalam era masyarakat digital.

The digital transformation has reshaped the way people interact, form opinions, and express national identity. The digital space has evolved beyond a communication tool into a contested arena of narratives deeply intertwined with political, cultural, and ideological dynamics. This article aims to analyze how the values of Pancasila can remain relevant as an ethical framework for public behavior in an increasingly complex digital ecosystem. Using a descriptive qualitative approach and current literature review, the discussion focuses on three main aspects: the dynamics of national narratives in virtual space, the representation and reduction of Pancasila's values on social media, and the function of Pancasila as a foundation for ethical conduct in digital platforms. The findings indicate that although Pancasila is often positioned in a normative or ceremonial manner, its values remain vital in addressing challenges such as disinformation, hate speech, and identity polarization. Contextual reinterpretation of its values, strengthening digital ethics literacy, and fostering cross-sector collaboration are necessary to enable Pancasila to serve as a living moral compass for citizens in the virtual public sphere. Thus, Pancasila can function not only as a state ideology but also as a fundamental guide for ethical digital citizenship in the information society.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Mas'ud, F., Istianah, A. (2025). Ekosistem Digital dan Narasi Kebangsaan: Relevansi Pancasila sebagai Penuntun Etika Publik Virtual, *Haumeni Journal of Education*, 5(1), 18-26. doi: 10.35508/haumeni.v5i1.21505

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi sosial dan politik masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah menciptakan ruang publik baru yang bersifat terbuka, horizontal, dan *real-time*. Dalam konteks ini, interaksi antarindividu tidak lagi dibatasi oleh ruang geografis, melainkan terhubung melalui platform digital seperti Facebook, Twitter/X, Instagram, YouTube, dan TikTok. Media sosial tidak hanya menjadi medium komunikasi personal, tetapi juga ruang artikulasi ideologis, ekspresi budaya, dan konstruksi narasi kebangsaan. Media sosial telah menjadi "ruang publik virtual" di mana berbagai kepentingan sosial, politik, dan identitas saling bersinggungan, membentuk dinamika wacana yang kompleks dan sering kali ambivalen (Anggara et al., 2025).

Namun, di balik potensi demokratisasi informasi yang ditawarkan oleh media sosial, terdapat pula sisi gelap dari ruang digital yang perlu diwaspadai. Fenomena hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, perundungan digital (*cyberbullying*), dan polarisasi identitas telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan digital masyarakat Indonesia (Prasetyo & Widodo, 2022). Dalam ruang yang minim moderasi nilai dan etika, narasi kebangsaan yang seharusnya menjadi perekat persatuan justru kerap dikaburkan oleh wacana-wacana sektarian, intoleran, dan eksklusif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya nilai-nilai kebangsaan sebagai landasan interaksi sosial di dunia maya.

Di sinilah urgensi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi terbuka menjadi sangat penting. Pancasila bukan hanya simbol formal kenegaraan, melainkan sistem nilai yang mengandung prinsip-prinsip etika sosial, politik, dan budaya. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial memiliki daya aplikatif dalam membentuk perilaku warga negara yang bertanggung jawab, toleran, dan menghargai perbedaan. Reaktualisasi Pancasila dalam konteks digital harus dilakukan bukan semata-mata melalui retorika simbolik, melainkan melalui internalisasi nilai dalam praktik komunikasi sehari-hari, termasuk di media sosial (Hanik & Azwar, 2025).

Relevansi Pancasila dalam ekosistem digital menjadi semakin penting ketika media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berubah menjadi arena politik simbolik, tempat di mana wacana identitas dan kebangsaan dipertarungkan. Purwaningsih dkk (2022) mengemukakan bahwa "nasionalisme digital" saat ini tengah mengalami tantangan serius karena kemunculan kelompok-kelompok yang memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan ide-ide yang bertentangan dengan semangat kebangsaan, seperti ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi berbasis identitas. Jika ruang digital dibiarkan tanpa arah etika yang jelas, maka nilai-nilai dasar kebangsaan berisiko terpinggirkan oleh logika algoritma dan ekonomi atensi.

Melihat kompleksitas tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menggali secara lebih dalam bagaimana Pancasila dapat difungsikan sebagai penuntun etika publik virtual dalam menghadapi tantangan ekosistem digital. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam artikel ini antara lain: Bagaimana dinamika narasi kebangsaan terbentuk di media sosial? Bagaimana representasi dan reduksi nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital untuk mengarahkan interaksi yang lebih etis dan konstruktif? Serta, bagaimana Pancasila dijadikan sebagai kerangka etika publik virtual?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang dikombinasikan dengan analisis wacana kritis untuk memahami dinamika narasi kebangsaan di media sosial serta relevansi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk etika publik virtual. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi makna-makna simbolik dan ideologis dalam teks serta praktik komunikasi digital masyarakat.

Sumber data terdiri atas: Data primer, berupa teks digital seperti unggahan media sosial, pernyataan tokoh publik, kampanye daring bertema kebangsaan, serta diskusi netizen terkait isu Pancasila dan nasionalisme. Data sekunder, berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik kajian. Analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough, yang mencakup tiga dimensi: (1) analisis teks, untuk mengungkap struktur dan makna eksplisit dalam narasi kebangsaan digital; (2) analisis praktik diskursif, untuk menelusuri produksi dan distribusi narasi tersebut; serta (3) analisis praktik sosial, untuk melihat bagaimana wacana tersebut merefleksikan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Teknik triangulasi sumber diterapkan untuk menjaga validitas temuan, dengan membandingkan berbagai jenis data (media sosial, dokumen ilmiah, dan referensi kebijakan). Seluruh proses dilakukan secara sistematis guna memperoleh pemahaman mendalam tentang posisi Pancasila sebagai panduan etika dalam ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Narasi Kebangsaan di Ruang Digital

Era digital telah menciptakan ruang publik baru yang bersifat cair, terbuka, dan sangat cepat dalam menyebarkan informasi. Di dalam ruang ini, narasi kebangsaan yang semula dibangun secara institusional dan terstruktur mengalami disrupsi melalui proses produksi ulang oleh aktor-aktor non-negara. Media sosial menjadi panggung utama di mana simbol, ideologi, dan nilai kebangsaan dipertukarkan, diperdebatkan, bahkan didekonstruksi secara terbuka.

Penelitian ini menemukan bahwa narasi kebangsaan di media sosial cenderung muncul dalam dua pola dominan. Pertama, narasi yang bersifat afirmatif dan pro-integrasi nasional, ditandai dengan kampanye digital bertema persatuan, toleransi, keberagaman, dan anti-radikalisme. Kampanye semacam ini misalnya terlihat dalam gerakan digital seperti #BhinnekaTunggalIka, #KitaIndonesia, atau

#LawanRadikalisme yang sering didorong oleh lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas digital. Narasi ini mengedepankan nilai-nilai nasionalisme inklusif serta mendorong solidaritas sosial berbasis keragaman (Que & Najicha, 2024).

Namun, pola kedua justru memperlihatkan kecenderungan fragmentasi narasi kebangsaan. Di banyak ruang digital, nasionalisme direduksi menjadi identitas kelompok yang eksklusif, sering kali bersifat sektarian dan digunakan untuk menyerang pihak yang dianggap berbeda atau "tidak nasionalis". Hashtag seperti #AnakNegara vs #AnakKadrun, atau narasi semacam "pembela NKRI" vs "penghianat bangsa", menciptakan dikotomi tajam yang membelah ruang publik digital. Polarisasi semacam ini tidak hanya melemahkan kohesi sosial, tetapi juga membingkai nasionalisme sebagai proyek ideologis yang kompetitif dan eksklusif (Jannah & Kusno, 2020).

Lebih jauh, analisis praktik diskursif menunjukkan bahwa narasi kebangsaan di media sosial sangat terpengaruh oleh mekanisme viralitas dan algoritma platform digital. Konten yang menimbulkan emosi ekstrem seperti kemarahan atau fanatisme lebih mudah mendapatkan atensi dan disebarluaskan secara luas. Akibatnya, narasi kebangsaan yang moderat, reflektif, atau edukatif sering kali kalah dalam persaingan atensi dengan narasi provokatif yang memicu perpecahan. Hal ini menciptakan apa yang disebut Livingstone & Helspe (2022) sebagai behavioral surplus dimana emosi kolektif dijadikan komoditas oleh platform digital untuk meningkatkan keterlibatan pengguna.

Misalnya, sebuah unggahan yang membahas kebhinekaan secara positif mendapatkan reaksi jauh lebih sedikit dibandingkan unggahan yang memuat ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas dengan membungkusnya dalam jargon nasionalisme. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana nasionalisme digital telah menjadi arena kontestasi makna yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kultural dari berbagai aktor.

Selain itu, penting dicermati bahwa narasi kebangsaan di ruang digital tidak selalu dihasilkan oleh warga negara atau institusi resmi. Banyak aktor transnasional, buzzer politik, bahkan akun anonim atau bot digital, turut memproduksi narasi yang mengklaim mewakili suara kebangsaan. Hal ini menimbulkan ambiguitas antara apa yang disebut sebagai ekspresi kebangsaan yang otentik dengan yang direkayasa untuk kepentingan tertentu. Dalam kondisi ini, nilai-nilai ideologis Pancasila rawan mengalami distorsi dan digunakan secara pragmatis oleh kelompok yang menguasai narasi digital.

Dengan demikian, dinamika narasi kebangsaan di ruang digital tidak dapat dipandang sebagai fenomena monolitik. Ia bersifat plural, kompetitif, dan sangat dipengaruhi oleh struktur komunikasi digital. Ini menunjukkan bahwa pembinaan kesadaran kebangsaan tidak cukup dilakukan melalui instruksi normatif, melainkan perlu diintegrasikan ke dalam ekosistem digital yang mengedepankan etika komunikasi, literasi digital kritis, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila secara kontekstual.

2. Representasi dan Reduksi Nilai Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki peran sentral dalam membentuk arah kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam perilaku masyarakat di ruang digital. Namun,

hasil analisis menunjukkan bahwa representasi nilai-nilai Pancasila di ekosistem digital sering kali tidak hadir secara substantif, melainkan lebih bersifat simbolik, normatif, dan terkadang manipulatif.

Dalam konteks representasi, Pancasila sering muncul dalam bentuk kampanye daring yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah atau komunitas nasionalis. Misalnya, unggahan bertema Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni kerap membanjiri linimasa media sosial dengan gambar bendera, kutipan Bung Karno, atau video pidato nasional. Namun, pendekatan semacam ini umumnya hanya menampilkan Pancasila sebagai simbol politik yang ditinggikan secara retorik, bukan sebagai nilai hidup yang terinternalisasi dalam tindakan dan etika digital masyarakat sehari-hari (Purwaningsih et al., 2022).

Representasi yang sempit ini pada akhirnya menciptakan reduksi nilai Pancasila menjadi sekadar alat mobilisasi politik atau sarana pembingkai ideologis. Misalnya, Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dalam beberapa kasus digunakan oleh aktor tertentu untuk menstigma pihak yang berbeda pandangan politik sebagai “anti-NKRI” atau “pengkhianat bangsa”. Narasi seperti ini tidak hanya menyimpang dari semangat Pancasila yang inklusif, tetapi juga menciptakan ruang eksklusivisme nasionalisme yang merugikan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi (Prasetyo & Widodo, 2022).

Selain itu, Sila Kedua tentang Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang seharusnya mendorong perilaku sopan, empatik, dan menghargai martabat orang lain dalam interaksi digital, justru sering terabaikan. Praktik perundungan digital (*cyberbullying*), ujaran kebencian (*hate speech*), serta disinformasi kerap terjadi bahkan di akun-akun yang mengatasnamakan semangat nasionalisme dan Pancasila. Hal ini menandakan adanya jurang antara klaim ideologis dan praktik digital yang sesungguhnya.

Hasil penelusuran pada sejumlah akun publik juga menunjukkan bahwa Pancasila kadang dijadikan “tameng moral” untuk membenarkan tindakan intoleran. Misalnya, kampanye melawan kelompok tertentu atas nama “menjaga Pancasila” namun dengan cara yang mencederai prinsip demokrasi dan kemanusiaan. Fenomena ini mencerminkan gejala instrumentalisasi Pancasila, yaitu pemanfaatan nilai luhur bangsa untuk membungkus kepentingan kelompok tertentu dalam persaingan wacana digital (Kaelan, 2021).

Reduksi nilai Pancasila juga tampak pada kurangnya pemaknaan etis dalam ekspresi kebangsaan digital. Banyak narasi Pancasila yang hanya berputar pada jargon seperti “Pancasila harga mati” atau “jangan lupakan Pancasila”, tanpa menjelaskan bagaimana kelima sila dapat diterapkan secara nyata dalam menghadapi persoalan digital kontemporer seperti hoaks, polarisasi politik, hingga algoritma yang menciptakan disinformasi massal.

Ketiadaan pendekatan pedagogis atau naratif yang menjembatani antara nilai Pancasila dan praktik bermedia sosial sehari-hari menyebabkan nilai-nilai tersebut sulit dihayati secara kontekstual. Padahal, Pancasila bukan sekadar dokumen ideologis, tetapi juga panduan etik untuk merawat ruang publik digital yang inklusif, rasional, dan beradab.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendekatan baru dalam merepresentasikan Pancasila di ruang digital, yaitu pendekatan partisipatif dan naratif, yang melibatkan generasi muda, *content creator*,

dan komunitas digital untuk menarasikan ulang nilai-nilai Pancasila dalam bahasa visual, cerita, dan gaya komunikasi yang relevan. Representasi yang hidup dan dinamis inilah yang dapat menjembatani antara ideologi nasional dan budaya digital masyarakat kontemporer.

3. Pancasila sebagai Kerangka Etika Publik Virtual

Transformasi komunikasi sosial ke dalam ruang digital telah menciptakan realitas baru yang disebut sebagai publik virtual, yaitu ruang interaksi yang melampaui batas geografis dan menghadirkan kebebasan berekspresi dalam skala yang masif dan instan. Di tengah derasnya arus informasi dan opini yang beredar, tantangan utama yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah menjaga etika bermedia sosial yang tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya relevan sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai kerangka etika publik virtual yang dapat membimbing perilaku warga digital agar tetap menjunjung nilai kemanusiaan, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

Setiap sila dalam Pancasila dapat dikontekstualisasikan menjadi prinsip-prinsip etika digital: *Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)* mengandung nilai spiritualitas dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Dalam praktik digital, sila ini menuntut pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian berbasis agama, tidak memprovokasi konflik SARA, serta menjunjung prinsip toleransi antarpemeluk agama, baik dalam diskusi publik maupun dalam konten yang dibagikan.

Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam ruang digital, prinsip ini menuntut sikap anti-perundungan (*anti-bullying*), perlindungan terhadap privasi individu, serta penolakan terhadap penyebaran disinformasi yang merugikan kelompok rentan. Etika ini sangat penting mengingat banyaknya praktik doxing, ujaran kebencian, dan pelecehan daring yang terjadi di media sosial.

Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) memberikan dasar untuk memperkuat solidaritas kebangsaan dalam keberagaman. Di ruang digital, sila ini dapat memandu perilaku untuk menolak narasi polarisasi, tidak menyebarkan hoaks yang memecah belah, dan mendorong inklusivitas dalam interaksi sosial lintas identitas, baik etnis, budaya, maupun politik.

Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan) relevan dalam membentuk budaya digital demokratis yang terbuka terhadap dialog. Prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai sikap menghargai perbedaan pendapat, tidak menyerang pribadi dalam debat daring, serta mendorong diskusi berbasis argumen dan kebijaksanaan, bukan emosi atau intimidasi massa.

Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) mencerminkan tuntutan keadilan distribusi informasi dan peluang partisipasi. Dalam konteks digital, sila ini dapat

memandu upaya melawan kesenjangan akses informasi (*digital divide*), mempromosikan literasi digital yang merata, serta menciptakan platform yang inklusif untuk semua warga, termasuk kelompok marginal.

Tantangan utama dalam mengaktualisasikan Pancasila sebagai kerangka etika digital adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi secara sadar dan tidak sekadar normatif. Saat ini, mayoritas etika bermedia sosial masih ditentukan oleh aturan platform digital global seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai lokal atau nasional. Di sinilah peran Pancasila menjadi penting sebagai acuan lokal yang menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial .

Namun demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila di ruang digital bukan tanpa hambatan. Terdapat kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap Pancasila di tingkat institusional dengan praktik keseharian masyarakat digital. Sering kali, prinsip-prinsip Pancasila dijadikan materi hafalan di sekolah atau kampanye formal di hari-hari besar nasional, tetapi tidak diterjemahkan ke dalam perilaku digital yang etis. Akibatnya, banyak pengguna media sosial yang tidak memiliki acuan etis dalam berinteraksi, yang menyebabkan meningkatnya konflik, disinformasi, dan intoleransi di ruang publik digital (Yunas, 2024).

Guna menjadikan Pancasila sebagai kerangka etika publik virtual yang efektif, perlu dilakukan reaktualisasi nilai secara kontekstual dan partisipatif. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain:

- a) Integrasi Pancasila dalam Pendidikan Literasi Digital. Literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman etika dalam menggunakan informasi. Program literasi digital berbasis nilai Pancasila perlu dikembangkan di sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat, dengan pendekatan berbasis studi kasus nyata dan praktik reflektif.
- b) Kreativitas Naratif dalam Konten Digital. Para kreator konten perlu diberdayakan untuk menarasikan Pancasila dalam bentuk yang menarik, menyentuh, dan relevan dengan kultur digital anak muda. Penggunaan medium video pendek, meme edukatif, podcast nilai kebangsaan, dan *storytelling* interaktif dapat memperluas jangkauan dan makna Pancasila di ruang publik digital.
- c) Kolaborasi Multiaktor dalam Membangun Ekosistem Digital Etis. Pemerintah, akademisi, pegiat literasi, pelaku industri digital, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi membangun infrastruktur nilai di ruang maya. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung ekspresi kebangsaan yang sehat, dialogis, dan berbasis nilai Pancasila.

- d) Etika Platform Berbasis Konteks Lokal. Platform digital di Indonesia dapat didorong untuk memasukkan elemen nilai Pancasila dalam kebijakan moderasi konten, kampanye digital, dan fitur interaksi sosial. Pendekatan etika digital berbasis Pancasila ini bisa menjadi model alternatif bagi negara-negara lain yang juga tengah mencari kerangka etis lokal di tengah globalisasi digital.

SIMPULAN

Ekosistem digital telah menjadi ruang baru bagi konstruksi dan kontestasi narasi kebangsaan di Indonesia. Di tengah kompleksitas interaksi virtual, Pancasila menunjukkan relevansinya sebagai penuntun etika publik yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Sebagai ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis, Pancasila dapat dijadikan kerangka normatif dalam menanggapi tantangan etika digital seperti disinformasi, ujaran kebencian, intoleransi, dan fragmentasi identitas.

Namun demikian, aktualisasi Pancasila di ruang digital tidak serta merta terjadi tanpa hambatan. Masih lemahnya literasi etika digital, dominasi narasi sektarian, dan minimnya keterlibatan generasi muda dalam memproduksi konten kebangsaan menjadi tantangan serius yang perlu diatasi secara kolaboratif. Oleh karena itu, dibutuhkan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila secara kontekstual, penguatan pendidikan literasi digital berbasis etika kebangsaan, serta inovasi kebijakan yang mendukung pembentukan ruang publik digital yang inklusif dan berkeadaban.

Melalui integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik bermedia sosial sehari-hari, masyarakat Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan ruang digital bukan hanya sebagai wahana komunikasi, tetapi juga sebagai arena pembentukan karakter dan penguatan identitas kebangsaan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya hidup dalam teks konstitusional, tetapi juga mewujudkan nyata dalam etika dan budaya digital bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, A., Azizi, A. F. B., Sabrina, A. M., Salma, C. Z. P., Jannah, I. W., & Supriyono. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 73–77.
- Hanik, H., & Azwar, W. (2025). The Pancasila-Based Character Education Model Within the Three Educational Centers: Challenges and Opportunities in the Digital Era. *International Seminar on Student Research in Education, Science, and Technology*, 25 April 2025, 235–241. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/issrectec/article/view/30443>
- Harsya, R. M. K., Nasir, B., Mas'ud, F., Serang, R. A., & Harsono, I. (2024). The Role of Financial Digitalization in Eradicating Corruption in Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1731-1737. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6580>
- Jannah, M., & Kusno, K. (2020). Peranan Pendidikan Pancasila Bagi Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Dan Moral Berbangsa Dan Bernegara. *Civitas*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.36987/civitas.v1i1.1667>
- Kaelan. (2021). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Paradigma.

- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2022). Balancing opportunities and risks in teenagers' use of the internet: The role of digital literacy. *New Media & Society*, 24(3), 602–618. <https://doi.org/10.1177/14614448211050568>
- Mas'ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran Di Kota Kupang). *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 11-19.
- Mas'ud, F. (2024). Peran Perempuan di Sektor Publik: Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan Pegawai SPBU di Kota Kupang. *Media Sains*, 24(2), 61-64.
- Mas'ud, F., Kale, D. Y. A., Doko, M. M., Nassa, D. Y. (2025). Dasar Konsep Pendidikan Moral. *Tangguh Denara Jaya*
- Nugraha, A. B., Mas'ud, F., Sudiyarti, S., Qurtubi, A. N., & Fkun, E. (2023). Death Penalty for Ferdy Sambo In Human Rights Perspective. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(3), 1342-1346.
- Prasetyo, H., & Widodo, S. (2022). *Etika Informasi dan Pancasila dalam Era Digital*. UB Press.
- Purwaningsih, A., Riyanti, D., & Prasetyo, D. (2022). Digital Citizenship in Indonesia: Digital Literacy and Digital Politeness Using Social Media. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(3), 628–637. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p628-637>
- Que, B. I. A., & Najicha, F. U. (2024). Pancasila Sebagai Pilar Etika Di Dunia Digital: Membangun Panduan Perilaku Yang Bermartabat di Media Sosial. *BORNEO Law Review*, 8(1), 17–31. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v8i1.5579>
- Susilawati, M., Syunikitta, M., Silamat, E., Mas'ud, F., & Nggandung, Y. (2025). *Collaboration of Indigenous Communities and Academics in Creating Digital-Based Technology*. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 5(2), 177–183. <https://doi.org/10.31004/jh.v5i2.2389>
- Yunas, N. S. (2024). The Existence of Pancasila Values and its Threats in the Digital Space of the Millennial Generation. *Journal of Civics and Moral Studies*, 9(1), 1–12.